



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadann Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);
7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008](#) tentang Hibah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan

melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

6. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
7. Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DBB + DAU + LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

KF	=	Kapasitas Fiskal
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH	=	Dana Bagi Hasil
DAU	=	Dana Alokasi Umum
LP	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP	=	Belanja Pegawai

- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.
- (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.
- (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh provinsi.
- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh kabupaten/kota.
- (6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
 - a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks \geq 2) merupakan

- Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
- b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
 - c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
 - d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

- (1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.
- (2) Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Kabupaten Padang Lawas Utara;
 2. Kabupaten Padang Lawas;
 3. Kabupaten Manggarai Timur;
 4. Kabupaten Kubu Raya;
 5. Kabupaten Tana Tidung;
 6. Kabupaten Pesawaran;
 7. Kota Serang; dan
 8. Kota Tual.
- (3) Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Kabupaten Mamberamo Tengah;
 2. Kabupaten Yalimo;
 3. Kabupaten Lanny Jaya;
 4. Kabupaten Nduga;
 5. Kabupaten Puncak;
 6. Kabupaten Dogiyai;
 7. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 8. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 9. Kabupaten Bengkulu Tengah;
 10. Kota Sungai Penuh;
 11. Kabupaten Lombok Utara;
 12. Kabupaten Sigi;
 13. Kabupaten Toraja Utara;
 14. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 16. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 17. Kabupaten Buru Selatan;
 18. Kabupaten Kepulauan Anambas;
 19. Kabupaten Nias Utara;
 20. Kabupaten Nias Barat;
 21. Kota Gunung Sitoli;
 22. Kabupaten Pringsewu;
 23. Kabupaten Mesuji;
 24. Kabupaten Tujang Bawang Barat;
 25. Kota Tangerang Selatan;
 26. Kabupaten Sabu Raijua;
 27. Kabupaten Pulau Morotai;
 28. Kabupaten Intan Jaya;
 29. Kabupaten Deiyai;
 30. Kabupaten Tambrauw;

31. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
32. Kabupaten Maybrat.

BAB V

PETA KAPASITAS FISKAL
MASING-MASING DAERAH

Pasal 6

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- b. Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
- c. Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 426

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kpasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1,0053	Tinggi
2	Provinsi Sumatera Utara	0,5654	Sedang

3	Provinsi Sumatera Barat	0,9763	Sedang
4	Provinsi Riau	2,0529	Sangat Tinggi
5	Provinsi Jambi	1,3824	Tinggi
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,5820	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	0,5963	Sedang
8	Provinsi Lampung	0,2871	Rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	7,9325	Sangat Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,4167	Rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,2412	Rendah
12	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,5009	Sedang
13	Provinsi Jawa Timur	0,3093	Rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,7881	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,7362	Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,4487	Sangat Tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	4,9662	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,8967	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,5015	Sedang
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,5504	Sedang
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,5223	Sedang
22	Provinsi Bali	2,1158	Sangat Tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,2237	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,2974	Rendah
25	Provinsi Maluku	0,4493	Rendah
26	Provinsi Papua	0,5062	Sedang
27	Provinsi Maluku Utara	1,5052	Tinggi
28	Provinsi Banten	0,8514	Sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	2,9668	Sangat Tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,6692	Sedang
31	Provinsi Kepulauan Riau	3,1331	Sangat Tinggi
32	Provinsi Papua Barat	1,1359	Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,7863	Sedang

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kpa
1	2	3
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kabupaten Aceh Barat	0,41
2	Kabupaten Aceh Besar	0,36
3	Kabupaten Aceh Selatan	0,41
4	Kabupaten Aceh Singkil	0,51
5	Kabupaten Aceh Tengah	0,41
6	Kabupaten Aceh Tenggara	0,61
7	Kabupaten Aceh Timur	0,21
8	Kabupaten Aceh Utara	0,21
9	Kabupaten Bireuen	0,21
10	Kabupaten Pidie	0,11
11	Kabupaten simeuleu	0,81
12	Kota Banda Aceh	0,81
13	Kota Sabang	1,41
14	Kota Langsa	0,51
15	Kota Lhokseumawe	0,71

16	Kabupaten Gayo Lues	1,30
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	0,50
18	Kabupaten Aceh Jaya	1,00
19	Kabupaten Nagan Raya	0,50
20	Kabupaten Aceh Tamiang	0,90
21	Kabupaten Bener Meriah	0,40
22	Kota Subulussalam	0,50
23	Kabupaten Pidie Jaya	0,20
II	Provinsi Sumatera Utara	
24	Kabupaten Asahan	0,20
25	Kabupaten Dairi	0,60
26	Kabupaten Deli Serdang	0,50
27	Kabupaten Tanah Karo	0,40
28	Kabupaten Labuhan Batu	0,30
29	Kabupaten Langkat	0,20
30	Kabupaten Mandailing Natal	0,30
31	Kabupaten Nias	0,20
32	Kabupaten Simalungun	0,20
33	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,30
34	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,20
35	Kabupaten Tapanuli Utara	0,40
36	Kabupaten Toba Samosir	0,70
37	Kota Binjai	0,70
38	Kota Medan	0,30
39	Kota Pematang Siantar	0,40
40	Kota Sibolga	1,00
41	Kota Tanjung Balai	0,60
42	Kota Tebing Tinggi	0,60
43	Kota Padang Sidempuan	0,50
44	Kabupaten Pakpak Barat	2,40
45	Kabupaten Nias Selatan	0,30
46	Kabupaten Humbang Hasundutan	0,90
47	Kabupaten Serdang Bedagai	0,30
48	Kabupaten Samosir	0,60
49	Kabupaten Batu Bara	0,20
III	Provinsi Sumatera Barat	
50	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,40
51	Kabupaten Agam	0,30
52	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,00
53	Kabupaten Padang Pariaman	0,30
54	Kabupaten Pasaman	0,40
55	Kabupaten Pesisir Selatan	0,40
56	Kabupaten Sawahlunti Sijunjung	0,90
57	Kabupaten Solok	0,40
58	Kabupaten Tanah Datar	0,60
59	Kota Bukit Tinggi	2,10
60	Kota Padang Panjang	3,50
61	Kota Padang	0,60
62	Kota Payakumbuh	1,20
63	Kota Sawahlunto	11,30
64	Kota Solok	3,90
65	Kota Pariaman	5,20
66	Kabupaten Pasaman Barat	0,60
67	Kabupaten Dharmasraya	0,80
68	Kabupaten Solok Selatan	1,10
IV	Provinsi Riau	
69	Kabupaten Bengkalis	3,60
70	Kabupaten Indragiri Hilir	0,70
71	Kabupaten Indragiri Hulu	1,40
72	Kabupaten Kampar	1,20
73	Kabupaten Kuantan Singingi	1,10
74	Kabupaten Pelalawan	1,30
75	Kabupaten Rokan Hilir	2,30
76	Kabupaten Rokan Hulu	0,70
77	Kabupaten Siak	8,10
78	Kota Dumai	2,40
79	Kota Pekanbaru	1,70
V	Provinsi Jambi	

80	Kabupaten Batanghari	1,1
81	Kabupaten Bungo	1,9
82	Kabupaten Kerinci	0,7
83	Kabupaten Merangin	0,9
84	Kabupaten Muaro Jambi	1,9
85	Kabupaten Sarolangun	1,0
86	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,2
87	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,1
88	Kabupaten Tebo	1,8
89	Kota Jambi	0,4
VI	Provinsi Sumatera Selatan	
90	Kabupaten Lahat	0,3
91	Kabupaten Musi Banyuasin	0,8
92	Kabupaten Musi Rawas	0,6
93	Kabupaten Muara Enim	0,5
94	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,3
95	Kabupaten Ogan Komering Ulu	0,9
96	Kota Palembang	0,2
97	Kota Prabumulih	1,3
98	Kota Pagar Alam	2,3
99	Kota Lubuk Linggau	0,7
100	Kabupaten Banyuasin	0,4
101	Kabupaten Ogan Ilir	0,4
102	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	0,4
103	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,6
104	Kabupaten Empat Lawang	0,5
VII	Provinsi Bengkulu	
105	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,3
106	Kabupaten Bengkulu Utara	0,4
107	Kabupaten Rejang Lebong	0,4
108	Kota Bengkulu	0,3
109	Kabupaten Kaur	0,5
110	Kabupaten Seluma	0,4
111	Kabupaten Mukomuko	0,8
112	Kabupaten Lebong	1,3
113	Kabupaten Kepahiang	0,8
VIII	Provinsi Lampung	
114	Kabupaten Lampung Barat	0,3
115	Kabupaten Lampung Selatan	0,0
116	Kabupaten Lampung Tengah	0,1
117	Kabupaten Lampung Utara	0,1
118	Kabupaten Lampung Timur	0,1
119	Kabupaten Tanggamus	0,1
120	Kabupaten Tulang Bawang	0,4
121	Kabupaten Way Kanan	0,2
122	Kota Bandar Lampung	0,2
123	Kota Metro	0,6
IX	Provinsi DKI Jakarta	
X	Provinsi Jawa Barat	
124	Kabupaten Bandung	0,1
125	Kabupaten Bekasi	0,6
126	Kabupaten Bogor	0,2
127	Kabupaten Ciamis	0,1
128	Kabupaten Cianjur	0,1
129	Kabupaten Cirebon	0,0
130	Kabupaten Garut	0,1
131	Kabupaten Indramayu	0,1
132	Kabupaten Karawang	0,2
133	Kabupaten Kuningan	0,1
134	Kabupaten Majalengka	0,1
135	Kabupaten Purwakarta	0,1
136	Kabupaten Subang	0,1
137	Kabupaten Sukabumi	0,1
138	Kabupaten Sumedang	0,2
139	Kabupaten Tasikmalaya	0,1
140	Kota Bandung	0,8
141	Kota Bekasi	0,4
142	Kota Bogor	0,3
143	Kota Cirebon	0,5

144	Kota Depok	1,20
145	Kota Sukabumi	0,50
146	Kota Tasikmalaya	0,10
147	Kota Cimahi	0,40
148	Kota Banjar	0,90
149	Kabupaten Bandung Barat	0,10
XI	Provinsi Jawa Tengah	
150	Kabupaten Banjarnegara	0,10
151	Kabupaten Banyumas	0,10
152	Kabupaten Batang	0,10
153	Kabupaten Blora	0,10
154	Kabupaten Boyolali	0,10
155	Kabupaten Brebes	0,00
156	Kabupaten Cilacap	0,10
157	Kabupaten Demak	0,10
158	Kabupaten Grobogan	0,10
159	Kabupaten Jepara	0,20
160	Kabupaten Karanganyar	0,10
161	Kabupaten Kebumen	0,00
162	Kabupaten Kendal	0,20
163	Kabupaten Klaten	0,10
164	Kabupaten Kudus	0,30
165	Kabupaten Magelang	0,10
166	Kabupaten Pati	0,10
167	Kabupaten Pekalongan	0,10
168	Kabupaten Pemasang	0,00
169	Kabupaten Purbalingga	0,10
170	Kabupaten Puworejo	0,10
171	Kabupaten Rembang	0,10
172	Kabupaten Semarang	0,20
173	Kabupaten Sragen	0,10
174	Kabupaten Sukoharjo	0,20
175	Kabupaten Tegal	0,10
176	Kabupaten Temanggung	0,10
177	Kabupaten Wonogiri	0,10
178	Kabupaten wonosobo	0,10
179	Kota Magelang	1,00
180	Kota Pekalongan	0,70
181	Kota Salatiga	1,00
182	Kota Semarang	0,80
183	Kota Surakarta	0,30
184	Kota Tegal	0,60
XII	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
185	Kabupaten Bantul	0,30
186	Kabupaten Gunung Kidul	0,10
187	Kabupaten Kulon Progo	0,10
188	Kabupaten Sleman	0,20
189	Kota Yogyakarta	0,50
XIII	Provinsi Jawa Timur	
190	Kabupaten Bangkalan	0,10
191	Kabupaten Banyuwangi	0,30
192	Kabupaten Blitar	0,20
193	Kabupaten Bojonegoro	0,10
194	Kabupaten Bondowoso	0,10
195	Kabupaten Gresik	0,10
196	Kabupaten Jember	0,10
197	Kabupaten Jombang	0,10
198	Kabupaten Kediri	0,10
199	Kabupaten Lamongan	0,10
200	Kabupaten Lumajang	0,10
201	Kabupaten Madiun	0,10
202	Kabupaten Magetan	0,20
203	Kabupaten Malang	0,10
204	Kabupaten Mojokerto	0,10
205	Kabupaten Nganjuk	0,10
206	Kabupaten Ngawi	0,10
207	Kabupaten Pacitan	0,10
208	Kabupaten Pamekasan	0,10
209	Kabupaten Pasuruan	0,10

210	Kabupaten Ponorogo	0,11
211	Kabupaten Probolinggo	0,06
212	Kabupaten Sampang	0,11
213	Kabupaten Sidoarjo	0,41
214	Kabupaten Situbondo	0,21
215	Kabupaten Sumenep	0,11
216	Kabupaten Trenggalek	0,11
217	Kabupaten Tuban	0,11
218	Kabupaten Tulungagung	0,21
219	Kota Blitar	1,21
220	Kota Kediri	1,21
221	Kota Madiun	1,11
222	Kota Malang	0,61
223	Kota Mojokerto	2,01
224	Kota Pasuruan	0,81
225	Kota Probolinggo	0,31
226	Kota Surabaya	0,71
227	Kota Batu	1,51
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	
228	Kabupaten Bengkayang	1,21
229	Kabupaten Landak	0,41
230	Kabupaten Kapuas Hulu	1,81
231	Kabupaten Ketapang	0,71
232	Kabupaten Pontianak	0,41
233	Kabupaten Sambas	0,41
234	Kabupaten Sanggau	1,11
235	Kabupaten Sintang	0,91
236	Kota Pontianak	0,51
237	Kota Singkawang	1,21
238	Kabupaten Sekadau	1,51
239	Kabupaten Melawi	0,91
240	Kabupaten Kayong Utara	0,71
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	
241	Kabupaten Barito Selatan	2,11
242	Kabupaten Barito Utara	2,81
243	Kabupaten Kapuas	1,01
244	Kabupaten Kotawaringin Barat	1,81
245	Kabupaten Kotawaringin Timur	1,11
246	Kota Palangkaraya	1,81
247	Kabupaten Katingan	2,91
248	Kabupaten Seruyan	3,51
249	Kabupaten Sukamara	8,11
250	Kabupaten Lamandau	5,61
251	Kabupaten Gunung Mas	3,21
252	Kabupaten Pulang Pisau	2,51
253	Kabupaten Murung Raya	5,91
254	Kabupaten Barito Timur	2,51
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	
255	Kabupaten Banjar	1,81
256	Kabupaten Barito Kuala	1,21
257	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1,11
258	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1,11
259	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1,11
260	Kabupaten Kotabaru	2,51
261	Kabupaten Tabalong	1,51
262	Kabupaten Tanah Laut	1,71
263	Kabupaten Tapin	2,81
264	Kota Banjarbaru	1,61
265	Kota Banjarmasin	0,91
266	Kabupaten Balangan	3,11
267	Kabupaten Tanah Bumbu	2,41
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	
268	Kabupaten Berau	10,41
269	Kabupaten Bulungan	5,11
270	Kabupaten Kutai	7,41
271	Kabupaten Kutai Barat	6,91
272	Kabupaten Kutai Timur	6,51
273	Kabupaten Malinau	9,81
274	Kabupaten Nunukan	4,51

275	Kabupaten Pasir	4,4
276	Kota Balikpapan	5,4
277	Kota Bontang	8,2
278	Kota Samarinda	2,4
279	Kota Tarakan	4,7
280	Kabupaten Penajam Paser Utara	5,1
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	
281	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3
282	Kabupaten Minahasa	0,6
283	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0,5
284	Kota Bitung	0,8
285	Kota Manado	0,9
286	Kabupaten Kepulauan Talaud	1,6
287	Kabupaten Minahasa Selatan	0,5
288	Kota Tomohon	2,1
289	Kabupaten Minahasa Utara	1,0
290	Kota Kotamobagu	0,3
291	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0,8
292	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang B	0,8
293	Kabupaten Minahasa Tenggara	0,4
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	
294	Kabupaten Banggai	0,4
295	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,5
296	Kabupaten Buol	0,7
297	Kabupaten Toli-Toli	0,5
298	Kabupaten Donggala	0,3
299	Kabupaten Morowali	0,6
300	Kabupaten Poso	0,5
301	Kota Palu	0,5
302	Kabupaten Parigi Moutong	0,3
303	Kabupaten Tojo Una Una	0,4
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	
304	Kabupaten Bantaeng	0,9
305	Kabupaten Barru	0,8
306	Kabupaten Bone	0,2
307	Kabupaten Bulukumba	0,4
308	Kabupaten Enrekang	0,4
309	Kabupaten Gowa	0,3
310	Kabupaten Jeneponto	0,2
311	Kabupaten Luwu	0,3
312	Kabupaten Luwu Utara	0,4
313	Kabupaten Maros	0,3
314	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,3
315	Kabupaten Pinrang	0,7
316	Kabupaten Kepulauan Selayar	0,9
317	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,1
318	Kabupaten Sinjai	0,6
319	Kabupaten Soppeng	0,6
320	Kabupaten Takalar	0,4
321	Kabupaten Tana Toraja	0,2
322	Kabupaten Wajo	0,6
323	Kota Pare-Pare	2,0
324	Kota Makassar	0,6
325	Kota Palopo	0,7
326	Kabupaten Luwu Timur	1,3
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
327	Kabupaten Buton	0,2
328	Kabupaten Konawe	0,2
329	Kabupaten Kolaka	0,4
330	Kabupaten Muna	0,1
331	Kota Kendari	0,7
332	Kota Bau-Bau	0,8
333	Kabupaten Konawe Selatan	0,4
334	Kabupaten Bombana	0,8
335	Kabupaten Wakatobi	0,7
336	Kabupaten Kolaka Utara	0,9
337	Kabupaten Konawe Utara	1,3
338	Kabupaten Buton Utara	0,6
XXII	Provinsi Bali	

339	Kabupaten Badung	6,6
340	Kabupaten Bangli	0,9
341	Kabupaten Buleleng	0,4
342	Kabupaten Gianyar	0,6
343	Kabupaten Jembarana	0,9
344	Kabupaten Karangasem	0,4
345	Kabupaten Klungkung	1,2
346	Kabupaten Tabanan	0,8
347	Kota Denpasar	2,5
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
348	Kabupaten Bima	0,2
349	Kabupaten Dompu	0,2
350	Kabupaten Lombok Barat	0,0
351	Kabupaten Lombok Tengah	0,0
352	Kabupaten Lombok Timur	0,0
353	Kabupaten Sumbawa	0,2
354	Kota Mataram	0,2
355	Kota Bima	0,5
356	Kabupaten Sumbawa Barat	0,8
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
357	Kabupaten Alor	0,4
358	Kabupaten Belu	0,2
359	Kabupaten Ende	0,3
360	Kabupaten Flores Timur	0,6
361	Kabupaten Kupang	0,2
362	Kabupaten Lembata	0,5
363	Kabupaten Manggarai	0,1
364	Kabupaten Ngada	0,4
365	Kabupaten Sikka	0,4
366	Kabupaten Sumba Barat	0,0
367	Kabupaten Sumba Timur	0,2
368	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,1
369	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,3
370	Kota Kupang	0,3
371	Kabupaten Rote Ndao	0,4
372	Kabupaten Manggarai Barat	0,4
373	Kabupaten Nagakeo	0,6
374	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,1
375	Kabupaten Sumba Tengah	0,4
XXV	Provinsi Maluku	
376	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	0,5
377	Kabupaten Maluku Tengah	0,3
378	Kabupaten Maluku Tenggara	0,4
379	Kabupaten Buru	0,6
380	Kota Ambon	0,8
381	Kabupaten Seram Bagian Barat	0,3
382	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,9
383	Kabupaten Kepulauan Aru	0,7
XXVI	Provinsi Papua	
384	Kabupaten Biak Numfor	0,6
385	Kabupaten Jayapura	1,5
386	Kabupaten Jayawijaya	0,2
387	Kabupaten Merauke	2,6
388	Kabupaten Mimika	2,0
389	Kabupaten Nabire	0,5
390	Kabupaten Paniai	0,8
391	Kabupaten Puncak Jaya	0,9
392	Kabupaten Yahukimo	0,6
393	Kota Jayapura	0,6
394	Kabupaten Mamberamo Raya	2,6
395	Kabupaten Tolikara	1,2
396	Kabupaten Keerom	2,8
397	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,8
398	Kabupaten Boven Digoel	5,4
399	Kabupaten Mappi	2,1
400	Kabupaten Asmat	1,7
401	Kabupaten Waropen	2,4
402	Kabupaten Sarmi	4,7
403	Kabupaten Supiori	4,2

404	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,5
XXVII	Provinsi Maluku Utara	
405	Kabupaten Halmahera Tengah	2,2
406	Kabupaten Halmahera Barat	1,1
407	Kota Ternate	2,5
408	Kabupaten Halmahera Timur	2,3
409	Kabupaten Halmahera Selatan	1,3
410	Kabupaten Halmahera Utara	1,7
411	Kabupaten Kepulauan Sula	2,2
412	Kota Tidore Kepulauan	3,3
XXVIII	Provinsi Banten	
413	Kabupaten Lebak	0,2
414	Kabupaten Pandeglang	0,2
415	Kabupaten Serang	0,3
416	Kabupaten Tangerang	0,3
417	Kota Cilegon	2,2
418	Kota Tangerang	0,4
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	
419	Kabupaten Bangka	1,4
420	Kabupaten Belitung	2,1
421	Kota Pangkal Pinang	3,0
422	Kabupaten Bangka Selatan	3,8
423	Kabupaten Bangka Tengah	2,4
424	Kabupaten Bangka Barat	4,3
425	Kabupaten Belitung Timur	2,7
XXX	Provinsi Gorontalo	
426	Kabupaten Boalemo	0,4
427	Kabupaten Gorontalo	0,1
428	Kota Gorontalo	1,7
429	Kabupaten Pohuwato	0,6
430	Kabupaten Bone Bolango	0,7
431	Kabupaten Gorontalo Utara	0,5
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	
432	Kabupaten Natuna	10,2
433	Kabupaten Karimun	2,8
434	Kota Batam	1,2
435	Kota Tanjung Pinang	1,8
436	Kabupaten Lingga	1,4
437	Kabupaten Bintan	2,8
XXXII	Provinsi Papua Barat	
438	Kabupaten Sorong	1,3
439	Kabupaten Manokwari	0,4
440	Kabupaten Fak-Fak	1,7
441	Kota Sorong	1,5
442	Kabupaten Raja Ampat	3,9
443	Kabupaten Sorong Selatan	2,8
444	Kabupaten Teluk Bintuni	2,2
445	Kabupaten Teluk Wondama	2,3
446	Kabupaten Kaimana	4,7
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	
447	Kabupaten Majene	0,5
448	Kabupaten Mamuju	0,9
449	Kabupaten Polewali Mandar	0,2
450	Kabupaten Mamasa	0,7
451	Kabupaten Mamuju Utara	3,0

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN

No	Daerah	Daerah Induk		
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk	Kategori
1	2	3	4	5
DAERAH PEMEKARAN 2007				
1	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,3550	Rendah
2	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,3550	Rendah
3	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan	0,0989	Rendah
4	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Pontianak	0,4593	Rendah
5	Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten Bulungan	5,1753	Sangat Tinggi
6	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai	0,1525	Rendah
7	Kota Tual	Kabupaten Maluku Tenggara	0,4889	Rendah
8	kota Serang	Kabupaten Serang	0,3414	Rendah
DAERAH PEMEKARAN 2008				
1	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten Labuhan Batu	0,3499	Rendah
2	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten Labuhan Batu	0,3499	Rendah
3	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
4	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
5	Kota Gunung Sitoli	Kabupaten Nias	0,2357	Rendah
6	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Bengkalis	3,6035	Sangat Tinggi
7	Kota Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci	0,7412	Sedang
8	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten Bengkulu Utara	0,4147	Rendah
9	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Tanggamus	0,1367	Rendah
10	Kabupaten Mesuji	Kabupaten Tulang Bawang	0,4547	Rendah
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang	0,4547	Rendah
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3683	Rendah
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3683	Rendah
14	Kabupaten Sigi	Kabupaten Donggala	0,3126	Rendah
15	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Tana Toraja	0,2412	Rendah
16	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Barat	0,0986	Rendah
17	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Kupang	0,2552	Rendah
18	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	0,5445	Sedang
19	Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten Buru	0,6685	Sedang
20	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
21	Kabupaten Yalimo	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
22	Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
23	Kabupaten Nduga	Kabupaten Jayawijaya	0,2895	Rendah
24	Kabupaten Puncak	Kabupaten Puncak Jaya	0,9190	Sedang
25	Kabupaten Dogiyai	Kabupaten Nabire	0,5965	Sedang
26	Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten Paniai	0,8189	Sedang
27	Kabupaten Deiyai	Kabupaten Paniai	0,8189	Sedang
28	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Halmahera Utara	1,7389	Tinggi
29	Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Tangerang	0,3609	Rendah
30	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Natuna	10,2702	Sangat Tinggi
31	Kabupaten Tambrau	Kabupaten Sorong	1,3084	Tinggi
32	Kabupaten Maybrat	Kabupaten Sorong	1,3084	Tinggi

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI